

ISSN 1858-1226

JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN

Volume 3, Nomor 2, Desember 2007

Diterbitkan Oleh :

Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang

Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta

JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN

ISSN 1858-1226

Terbit Dua Kali Setahun pada Bulan Juli dan Desember, Berisi Artikel Ilmiah Hasil Penelitian dan Pemikiran di Bidang Pemberdayaan Sosial, Ekonomi dan Teknik Pertanian Terapan

Ketua Penyunting

Thomas Widodo

Wakil Ketua Penyunting

M. Adlan Larisu

Penyunting Pelaksana

Abdul Hamid
Ananti Yekti
Miftakhul Arifin
Joni Kurniawan

Mitra Bestari

Masyhuri (Universitas Gadjah Mada)
Aziz Purwantoro (Universitas Gadjah Mada)
E. W. Tri Nugroho (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa)
Sapto Husodo (Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang)
Zulkarnain (Universitas Jambi)

Staf Tata Usaha

Mulyanta

Alamat Penyunting dan Tata Usaha : Redaksi Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta, Jalan Kusumanegara No. 2 Yogyakarta
Kode Pos 55167 Telpn (0274) 373479 *Faximile* (0274) 375528 *E-Mail*:
jurnal_stppyogya@yahoo.com

JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Magelang Jurusan Penyuluhan Pertanian di Yogyakarta.

Penyunting menerima sumbangan tulisan yang belum pernah diterbitkan dalam penerbitan lain. Naskah diketik atas kertas HVS kuarto spasi ganda sepanjang lebih kurang 20 halaman, dengan format seperti tercantum pada halaman kulit dalam belakang (pedoman penulisan naskah). Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata penulisan lainnya tanpa merubah esensi naskah. Penulis yang artikelnya dimuat akan mendapatkan lima eksplar cetak lepas dan satu nomor bukti pemuatan. *Artikel yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan.*

Harga berlangganan termasuk ongkos kirim Rp. 50.000,00 per tahun untuk dua nomor penerbitan.

JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN

Volume 3, Nomor 2, Desember 2007

ISSN 1858-1226

DAFTAR ISI

Kelompok Tani sebagai Basis Ketahanan Pangan	79 – 86
Sunarru Samsi Hariadi	
Penyebaran Teknologi Konservasi Lahan Kering melalui Pemuka Pendapat di Kabupaten Bantul	87 – 99
R. Kunto Adi	
Peran Penyuluh Pertanian dalam Pelestarian Alam	100 – 111
Tri Nugroho	
Aplikasi Model Rekayasa Lahan Terpadu guna Meningkatkan Peningkatan Produksi Hortikultura secara Berkelanjutan di Lahan Pasir Pantai	112 – 123
Dody Kastono	
Model Pengembangan Agrowisata dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Tani Tawangrejo Asri	124 – 131
Miftakhul Arifin, Amie Sulastiyah, Ananti Yekti, Agus Wartapa	
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi BIPP Kulon Progo	132 – 143
Alia Bihrajihant Raya, Sri Peni Wastutiningsih, Sri Widodo	
Implementasi Prinsip-prinsip Pertanian Berkelanjutan oleh Petani di Kabupaten Kulon Progo	144 – 155
Dyah Woro Untari, Sri Peni Wastutiningsih, Irham	
Kajian Peran Kelembagaan Kelompok Tani dalam Mendapatkan Modal Usaha Agribisnis Bawang Merah	156 – 164
Sukadi	

PERAN PENYULUH PERTANIAN DALAM PELESTARIAN ALAM

(The Agriculture Extension Worker's role in the Environmental Revitalization)

Tri Nugroho

ABSTRACT

This article aims to answer on what is the agriculture extension worker's role in the environmental revitalization. The library research using an analytical-critical method showed that the agriculture extension worker's role should be able to change communities behaviors to be more responsible for what they will do, proactive, future oriented, and respectful to the local wisdoms.

Key words: the agriculture extension worker; the environmental revitalization, responsibility.

PENDAHULUAN

Kehidupan dan penghidupan petani yang akrab dengan alam akhir-akhir ini sungguh memilukan.

Di musim hujan, para petani masih saja tidak lepas dari derita. Hujan lebat yang datang tiba-tiba telah mengakibatkan banjir bandang dan tanah longsor. Hampir setiap tahun para petani terhempas kehidupannya oleh bencana ini. Bencana banjir bandang dan tanah longsor menimpa masyarakat dan lahan pertanian di Jember, Jatim, dan Banjarnegara, Jateng. Pertengahan April 2006 bencana yang sama menimpa lahan pertanian Trenggalek, Jatim. Sebelumnya, kejadian yang sama pada tanggal 28 Januari 2003 telah melanda masyarakat dan lahan pertanian di kaki gunung Mandalawangi, Kabupaten Garut, Jabar. Pada tanggal 11 Desember 2002, banjir bandang telah meluluhlantakkan kawasan Wana Wisata, Desa Padusan, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jatim. Tanggal 2 November 2003, bencana yang sama terjadi di desa Bukit

Lawang, Bohorok, Langkat, Sumut (Kompas, 7/1/2006, hal 1 dan Kompas 14/1/2006, hal. 51).

Di musim kemarau, lahan pertanian mengering, sebagian pecah-pecah dan tidak dapat ditanami. Tanaman palawija juga tidak banyak yang mampu bertahan hidup. Daun meranggas dan perlahan tanaman palawija mati. Derita para petani semakin panjang ketika udara semakin panas karena kenaikan suhu akibat pemanasan global. Banyak tanaman semakin tidak tahan oleh panas yang terus naik suhunya. Putaran iklim pun semakin tidak teratur. Musim kemarau semakin panjang dan musim hujan terlambat datangnya. Perubahan siklus musim ini sungguh menambah kesulitan para petani dalam menentukan musim tanam.

Bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor serta kekeringan senantiasa membawa kerugian yang amat besar: kerusakan hutan, lahan pertanian, perkebunan, peternakan, tempat pariwisata, harta benda, rumah, dan masyarakat sekitar tempat kejadian. Sanak keluarga korban pun turut menderita

menyaksikan penderitaan saudara-saudarinya. Gema penderitaan meluas sampai keseluruhan tanah air, bahkan ke negara lain. Mereka, yang mengetahui dan menyaksikan bencana alam melalui media cetak dan atau elektronik, ikut berduka merasakan kepedihan sesamanya tertimpa bencana alam.

Ke depan, bencana serupa masih akan terus terjadi mengingat mayoritas alam Indonesia bersifat labil dan pemanasan global terus berlanjut. Pertanyaannya: apa yang harus dibuat? Kerusakan dan pengrusakan alam harus dihentikan. Penghijauan dan pelestarian alam harus dilakukan. Dalam konteks itu, apa peran penyuluh pertanian? Apa peran penyuluh pertanian dalam memberdayakan masyarakat agar mereka mampu memahami dan menanggulangi bencana banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan, sehingga korban dapat diminimalisir? Itu lah beberapa pertanyaan yang mau dijawab dalam artikel ini.

PEMAHAMAN BENCANA ALAM

Sebagian anggota masyarakat memahami bencana sebagai sebuah takdir, yang datang dari Yang Maha Kuasa karena alasan tertentu pada diri masyarakat, misalnya, karena kesalahan dan dosa manusia. Dengan menjatuhkan hukuman dalam bentuk bencana, Yang Maha Kuasa ingin mengingatkan manusia akan kesalahannya dan mendorong mereka untuk memperbaiki diri. Di hadapan kuasa-Nya, manusia hanya dapat menerima dengan penuh kepasrahan. Prinsipnya “nrima ing pandum”, pasrah menerima keadaan. Oleh karena itu,

bencana alam dipahami sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, hanya dapat diterima begitu saja. Ini lah dua sebab yang membuat masyarakat tidak berdaya di hadapan bencana alam, seperti banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan. Kenyataan lain yang membuat mereka semakin tidak berdaya adalah kemiskinan. Kemiskinan membuat masyarakat terpaksa tinggal di daerah rawan bencana alam (Dedi Muhtadi, 2006: 49). Kemiskinan dan keterpaksaan semakin membuat mereka tidak berdaya.

Sungguhkah bencana banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan itu suatu takdir? Ataukah karena kelalaian dan “buatan” manusia? Hujan, dan morfologi tanah memang takdir, namun bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan adalah buatan manusia (masyarakat) yang datang membongceng di atas tanah yang mengabaikan pembangunan berkelanjutan. Bencana merupakan akumulasi kelalaian penanganan dan pembangunan serampangan. Fenomena ini refleksi insomnia masyarakat. Ingatan kolektif masyarakat tidak lagi sensitif membaca tanda-tanda alam yang dulu menjadi panduan sistem peringatan dini (Amir Sodikin dan Nur Hidayati, 2006:50). Ahli manajemen bencana yang kini staf ahli DPR untuk RUU Penanganan Bencana, Eko Teguh Paripurno mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam APBD sejak awal tidak memperhitungkan bencana. Perda juga tidak pernah menyinggung penanggulangan bencana. Perda cenderung mengeksploitasi bagaimana meningkatkan pendapatan (Amir

Sodikin dan Nur Hidayati, 2006:50). Hal senada disampaikan juga oleh Syafruddin Ngulma Simeulue, anggota Dewan Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi). Menurutnya, bencana alam yang belakangan kerap terjadi di Jawa Timur akibat pembangunan tidak pernah memperhitungkan faktor lingkungan. Dari 1,3 juta hektar hutan yang ada di Jawa Timur, sebanyak 315.000 hektar seharusnya menjadi hutan lindung. Namun, hingga kini lahan tersebut tidak pernah dikukuhkan menjadi hutan lindung. Lahan itu malah jadi hutan produksi yang dikelola Perhutani. "Kemampuan hutan Indonesia hanya mampu menyuplai 7 juta hektar meter kubik per tahun. Namun, industri butuh kayu hingga 70 juta meter kubik. Akibatnya laju kehancuran hutan di atas 2,5 juta hektar" (Kompas 14/1/2006, hal. 51).

Kalau bencana itu akibat dari kelalaian dan "buatan" manusia (masyarakat) sendiri, maka sesungguhnya bencana itu tidak harus diterima sebagai takdir yang tidak dapat diubah. Kenyataan ini bisa dan harus bisa diubah oleh masyarakat. Ini berarti, dengan segala upaya, perjuangan yang tidak kenal lelah, dan dengan keberanian mengubah sikap dan perilaku masyarakat terhadap alam, masyarakat dapat memahami, dan menanggulangi bencana alam seperti banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan.

PERUBAHAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP ALAM

Pemahaman masyarakat tentang bencana sebagai sebuah takdir mengindikasikan adanya pemahaman atas alam sebagai yang suci, setidaknya sebagai yang berhubungan dengan Yang Maha Suci, dan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu alam dan segala gerakannya mesti diterima dengan penuh hormat sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah.

Apakah pemahaman masyarakat seperti itu dapat berubah. Jika dapat berubah, kemanakah arah perubahan itu? Sejarah mencatat bahwa pemahaman masyarakat terhadap alam dapat berubah. Para filsuf Yunani dan Romawi, jauh sebelum abad moderen, telah menyadari bahwa manusia tidak sendirian di alam ini karena dalam alam dapat dijumpai juga binatang, tumbuhan, serta ciptaan tidak berjiwa lainnya. Mereka juga mengakui bahwa alam memiliki apa yang oleh para filsuf moderen disebut hak alami atau hak inheren. Pada waktu itu cara manusia beradaptasi dengan alam dilakukan penuh hormat dengan mengakui kesuciannya serta tanpa membuat pemisahan subyek-obyek. Selanjutnya, bersamaan dengan runtuhnya kebudayaan Yunani dan Romawi, serta munculnya zaman pencerahan budi, alam mendapat posisi yang berbeda dalam tradisi Barat. Tahap demi tahap orang mulai berpendapat bahwa alam sama sekali tidak memiliki hak dan nilai. Eksistensi mereka semata-mata untuk melayani kebutuhan manusia (Nash, 1989:16-17). Pemahaman tersebut diikuti oleh pemahaman bahwa relasi

yang sesuai antara manusia dengan alam adalah relasi kegunaan. Dengan kata lain, satu-satunya nilai alam adalah nilai instrumental. Penjelasan mengenai alam dilakukan dengan menggunakan kategori rasional yang ketat. Alam dan hukum-hukumnya yang semula dipandang sebagai misteri mulai diselidiki, dimanipulasi, dan dikuasai. Lebih lanjut Rene Descartes (1596-1650) menyatakan bahwa relasi manusia dengan alam tidak relevan untuk dijadikan obyek etika. Alasannya adalah, pengada di luar manusia hanyalah mesin irrasional yang tidak berperasaan. Alam hanya lah suatu instrumen yang bergerak seperti jam dan karena tidak berperasaan mereka lalu juga tidak dapat merasakan penderitaan. Descartes tidak ragu-ragu ketika mengatakan bahwa manusia adalah tuan dan pemilik alam. Adalah sah-sah saja ketika dengan keyakinan tersebut sikap manusia terhadap alam menjadi eksploitatif dan dominatif. Dualisme yang memisahkan manusia dengan alam tersebut merupakan pembenaran setiap tindakan terhadap alam.

Adalah gagasan yang revolusioner untuk kembali berpaling pada ide bahwa adanya dunia tidak semata-mata untuk kepentingan manusia. Para pemikir pra-ekologi meletakkan gagasan mereka dalam konteks religius, yakni keyakinan bahwa alam hadir karena dan untuk kemuliaan Sang Pencipta. Leibnitz (1646-1716) tidak hanya membuang dualisme manusia-alam tetapi sekaligus menolak pemisahan antara pengada yang hidup dengan yang tidak hidup. Selanjutnya Baruch Spinoza (1632-1677) lebih dekat lagi dalam mengantisipasi kesadaran

ekologis. Pendapat Spinoza jelas berseberangan dengan arus pemikiran kontemporer yang anthroposentris, karena ia mengajukan gagasan panteistik, yaitu gagasan yang menyatakan bahwa segala pengada merupakan manifestasi dari Sang Pencipta. Dalam filsafatnya tidak dikenal tingkat ciptaan yang lebih rendah atau pun paling tinggi. Oleh karena itu segala pengada memiliki hak untuk ada, dan nilai adanya tidak tergantung pada fungsi kegunaannya (Nash, 1989:20). Dewasa ini ada satu paham yang disebut egalitarianisme biosfer, yang dalam versi ketat, menjelaskan bahwa, pertama, semua bentuk kehidupan (mikroorganisme, pohon, binatang, manusia) memiliki nilai inheren, dan kedua, nilai inheren tersebut berada dalam peringkat yang sama. Ada pendapat yang mengatakan bahwa paham egalitarianisme biosfer mungkin mendapatkan embrionya dari gagasan Spinoza tersebut.

Sementara itu tradisi Timur sudah sejak semula menghidupi pemahaman bahwa manusia tidak hidup tanpa alam, bahkan lebih dari itu hidup manusia tergantung pada alam (Wangdi, 1995:101-103). Salah satu tradisi timur yang berbicara mengenai hal itu adalah filsafat Budhisme. Konsep Budhisme tentang ekologi meletakkan manusia sebagai bagian tidak terpisahkan dari alam. Karenanya, kalau alam hancur maka hancur pula kehidupan manusia. Sekurang-kurangnya, tidak mungkin bagi manusia untuk mempertahankan kehidupannya secara layak. Sependapat dengan filsafat Budhisme yaitu bahwa manusia adalah bagian dari alam Jonas menjelaskan bahwa paradigma

yang memandang manusia sebagai penguasa alam, sudah harus digantikan dengan pemahaman bahwa manusia adalah bagian dari alam. Harus disadari bahwa manusia bukan lah ukuran penilaian sebagaimana dinyatakan oleh paham anthroposentrisme. Jonas mengemukakan bahwa pemahaman anthroposentrisme sudah harus ditumbangkan dan digantikan dengan anthropomorfisme.

Catatan sejarah tersebut memberi harapan bahwa pemahaman masyarakat di Indonesia, khususnya masyarakat bencana, terhadap alam akan dapat berubah pula, seiring dengan berjalannya waktu, bertambahnya pengetahuan dan pengalaman, khususnya pengalaman buruk tertimpa bencana banjir, tanah longsor dan kekeringan. Perubahan pemahaman itu diharapkan akan bergerak ke arah pemahaman anthropomorfisme yaitu pemahaman yang mendasarkan diri pada kosmos. Alam diyakini bernilai pada dirinya sendiri dan dihadapan keyakinan tersebut dari manusia dituntut sikap hormat. Dalam pemahaman ini jelas bahwa sains tidak bebas nilai. *Deep ecology* melihat anthropomorfisme yang bersifat holistik merupakan alternatif paling logis untuk memecahkan problem ekologi dewasa ini.

PERAN PENYULUH PERTANIAN: MENGEMBANGKAN TANGGUNG JAWAB

Meredefinisi Peran

Sejarah sebagaimana diuraikan di atas adalah sejarah perubahan pemahaman

masyarakat terhadap alam. Perubahan pemahaman membuahakan perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat. Sejarah telah mencatat bahwa perilaku masyarakat dapat berubah atau diubah. Optimisme sejarah tergores jelas di sini: tiada hal baik yang tidak dapat diraih, sekalipun harus dengan pengorbanan diri. Meninggalkan kebiasaan buruk (merusak alam) untuk meraih kebiasaan baik (memelihara alam) seringkali dirasakan sebagai sebuah pengorbanan. Semangat inilah yang semestinya menjadi roh untuk meredevisi peran penyuluh pertanian.

Jika di masa lampau peran penyuluh pertanian berada seputar upaya meningkatkan hasil pertanian, mensosialisasikan tanaman varietas baru, pemakaian pupuk atau obat-obatan, dsb, kini peran itu terbentang lebih luas dan dalam. Kini peran para penyuluh pertanian terbentang hingga pelestarian alam, karena alam dalam arti luas (air, tanah, udara, dsb) sebagai lahan pertanian mengalami kerusakan. Pelestarian alam menjadi bagian hakiki dari penyuluhan, karena jika alam rusak, tidak ada penyuluhan pertanian. Alam yang rusak, lahan pertanianpun rusak. Solusi atas kerusakan lahan pertanian sekarang ini adalah pelestarian alam. Solusi parsial, seperti pemberian pupuk, atau obat saja, sama sekali tidak mencukupi. Alam yang rusak dan pemanasan global tidak dapat diatasi dengan solusi parsial, tetapi harus global berupa pelestarian alam. Oleh karena itu, materi etika lingkungan yang bertema “tanggung jawab” masyarakat terhadap alam tidak lagi dapat diabaikan dalam penyuluhan pertanian di jaman ini. Soalnya, kerusakan alam yang

mengakibatkan bencana dan banyak kerugian harta dan nyawa lebih disebabkan oleh perilaku manusia yang tidak bertanggungjawab.

Pengembangan Tanggung Jawab

Materi etika lingkungan yang bertema “tanggung jawab” yang ingin dikembangkan melalui penyuluhan dapat diuraikan sebagai berikut:

Sifat-sifat Tanggung Jawab

Di atas telah dijelaskan bahwa alam bernilai pada dirinya sendiri dan dari manusia dituntut sikap hormat. Sikap hormat yang dimaksud bukan lah sikap hormat yang buta. Artinya, alam tidak diterima begitu saja sebagai sebuah misteri, dan geraknya diterima sebagai sebuah takdir, namun alam harus disikapi dengan penuh tanggung jawab karena kebaikan intrinsik yang terdapat pada alam. Setiap pengambilan keputusan adalah meletakkan obyek tindakan sebagai realitas yang harus dihormati karena ia bernilai pada dirinya sendiri. Motivasi dasar yang mendorong suatu tindakan moral adalah kebaikan yang melekat pada pengada itu sendiri. Inilah imperatif yang menurut Jonas harus dipertimbangkan oleh manusia di hadapan kehendak bebasnya. Dengan demikian tanggung jawab itu sifatnya obyektif dan sekaligus subyektif (rasional dan emosional). Selain itu tanggung jawab, menurut Jonas, juga bersifat formal dan substantif. Tanggung jawab formal berkaitan dengan legalitas sedangkan tanggung jawab substantif lebih menekankan esensinya (Jonas, 1984,90). Tanggung jawab formal adalah tanggung jawab terhadap konsekuensi tindakan yang telah

dilakukan (Jonas 1984:90). Tanggung jawab substantif adalah tanggung jawab kepada seluruh obyek yang masuk dalam atmosfer tindakan. Seseorang bertanggungjawab bukan atas tindakannya dan konsekuensinya, melainkan kepada obyek yang mungkin terkena dampak tindakan itu dan karenanya dapat mengajukan klaim atas apa yang telah dilakukannya (Jonas, 1984:92).

Tanggung Jawab karena Diwajibkan

Kesulitan besar yang dimiliki masyarakat dalam menanggulangi bencana terletak dalam sikapnya yang melihat penanggulangan bencana sebagai sebuah tanggung jawab yang diwajibkan dari luar dirinya. Akibatnya seringkali muncul sikap tidak peduli. Darmono, kepala Bidang Pengairan Kabupaten Purworejo mengatakan: “Masyarakat bencana sendiri, kurang peduli terhadap daerah berbahaya. Mereka tetap bermukim di lereng bukit yang memiliki potensi longsor cukup besar” (Madina Nusrat, 2006:52). Pemerintah pun tampaknya tidak memiliki tanggung jawab yang mencukupi. Buktinya mereka tidak memiliki manajemen penanggulangan bencana yang baik.

Akibat minimnya tanggung jawab adalah jatuhnya korban baru. Korban bencana terbengkelai. Engkus (30), warga korban tanah longsor di kaki Gunung Mandalawangi, Kabupaten Garut, 28 Januari 2003 mengeluh: “Kami warga di sini merasa tidak lagi dipedulikan oleh pemerintah. Pemerintah seolah-olah menutup mata seusai kami dipindahlan ke sini (Kampung Cipurut). Padahal

hingga saat ini kondisi kami masih serba kekurangan” (Kompas 14/1/2006, hal. 53). Keluhan Engkus ini memang cukup beralasan. Peralannya, meski kawasan relokasi tersebut telah dibangun sejak 2 tahun lalu, sejumlah infrastruktur dasar, seperti jaringan listrik, air bersih, dan jalan ternyata belum ada. Bahkan bangunan masjid sebagai sarana ibadah pun tidak terlihat di lokasi itu.

Sebenarnya tanggung jawab masyarakat dan pemerintah yang mendasarkan tindakannya pada kewajiban bukan lah sesuatu yang baru. Kant sendiri menjelaskan moralitas yang berkaitan dengan hal yang baik dan buruk melalui paham kewajiban. Moralitas berarti kehendak baik untuk melakukan kewajiban demi kewajiban itu sendiri. Etika Kantian merupakan etika deontologis yang mengabaikan hasil suatu perbuatan. Oleh karena itu moralitas tindakan tidak boleh dipandang dari hasilnya, melainkan dari dorongan yang menyebabkan diambilnya suatu tindakan. Subyek dihargai sebagai pelaku moral yang dengan dibimbing oleh akal budinya mampu mengambil keputusan untuk berbuat baik. Dengan cara itu setiap individu akan memberi kontribusi kepada kemajuan moral dunia.

Kant menyatakan: “Kamu wajib maka kamu bisa” (Jonas, 1984:128). Pada Kant kewajiban merupakan parameter untuk mengukur apakah tindakan seseorang dapat dikatakan moral atau tidak. Imperatif kategoris Kant menyatakan bahwa kamu wajib, dan karena kamu wajib, maka kamu bisa. Alasannya, adalah rasio praktis tidak akan mewajibkan

manusia untuk melakukan suatu tindakan yang tidak akan mampu dilaksanakannya. Bagi Kant, yang terutama diperhatikan adalah kewajiban sedangkan kecenderungan hati, naluri, dan reaksi emotif lainnya berada di bawah paham kewajiban. Kehendak seyogyanya mewujudkan dalam tindakan atas nama kewajiban.

Dari penjelasan Kant di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya tanggung jawab dalam penanggulangan bencana banjir dan tanah longsor dapat saja berawal dari kewajiban yang didesakkan oleh pihak luar diri, seperti yang terjadi selama ini. Yang penting, kewajiban yang sifatnya eksternal tersebut secara bertahap diupayakan untuk menjadi milik sendiri, dan bersumber dari diri sendiri sebagai subyek pelaku. Sehingga kewajiban itu merupakan hasil dorongan dari dalam diri subyek pelaku.

Apakah proses internalisasi semacam itu mungkin di dalam masyarakat? Mungkin, sebab pada umumnya bencana besar meninggalkan pengalaman mendalam dan kemudian pengalaman mendalam itu akan mendesak masyarakat dari dalam dirinya untuk mencari solusi dengan lebih bertanggungjawab. Bencana yang meninggalkan pengalaman mendalam akan membuahkan desakan kewajiban untuk lebih bertanggungjawab. Kewajiban yang didasari pengalaman personal dan sosial akan menjadi kewajiban milik sendiri dan bukan semata-mata karena dorongan kekuatan eksternal.

Tanggung Jawab karena Mampu

Harus diakui bahwa tanggung jawab karena diwajibkan itu tidak mencukupi,

terutama untuk beban tanggungjawab yang cukup berat dan dalam waktu yang lama, seperti beban bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Tanggungjawab yang besar mesti didasari oleh kemampuan. Kalau tanggungjawab yang dilandasi kewajiban itu tidak mencukupi, bagaimana meningkatkannya? Persoalan ini dijawab oleh Jonas. Jonas membalik pernyataan Kant: kamu wajib maka kamu bisa, menjadi kamu wajib sebab kamu bisa (Jonas, 1984, 128). Berbeda dengan Kant yang tidak begitu memperhatikan daya kemampuan, Jonas sebaliknya berpendapat bahwa tanggung jawab erat kaitannya dengan kemampuan. Menurut Jonas, daya kemampuan merupakan faktor yang menjadikan tanggung jawab sebagai pusat moralitas. Daya kemampuan yang hadir bersamaan dengan pengetahuan dan kebebasan merupakan akar dari keharusan untuk bertanggungjawab. Meskipun binatang juga memiliki kemampuan untuk bertindak tetapi karena tindakannya digerakkan semata-mata oleh naluri, maka dari binatang tidak dapat dituntut tanggung jawab. Jonas berpendapat bahwa hanya pada manusia daya kemampuan dibebaskan dari kebutaan dan ketidakbebasan. Hanya pada manusia kekuatannya dapat membahayakan dirinya sendiri. Kkuatannya memungkinkan manusia untuk menentukan nasib, baik nasibnya sendiri sebagai individu atau kelompoknya, maupun nasib semesta. Oleh karena itu pada manusia muncul lah keharusan bertanggungjawab sebagai kontrol terhadap kekuatan yang dimilikinya. Jadi menurut Jonas,

munculnya tanggung jawab pertama-tama adalah karena dimilikinya daya kemampuan. Menurut Jonas, keharusan bertanggungjawab tidak semata-mata karena telah melakukan tindakan, tetapi terlebih karena daya kemampuan untuk bertindak (Jonas, 1984:128).

Terinspirasi oleh Kant, Jonas mengajukan imperatif kategoris yang baru. Bertindaklah sedemikian rupa sehingga akibat-akibat tindakanmu dapat diperdamaikan dengan kelestarian kehidupan manusiawi yang sejati (Jonas, 1984:11). Dengan itu Jonas bermaksud mengisi kekosongan dalam imperatif Kant. Jonas mau memberi isi pada imperatif Kant dengan memasukkan prinsip material, yakni kelestarian kehidupan manusiawi yang sejati. Segala dampak atau akibat tindakan manusia haruslah menunjang prinsip tersebut.

Dalam terang pemikiran Jonas di atas dapat dikatakan bahwa sesungguhnya kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya dalam menanggulangi bencana dapat ditingkatkan. Peningkatan dapat terjadi melalui peningkatan daya kemampuan. Sejalan dengan pemikiran Jonas, daya kemampuan masyarakat untuk memikul tanggung jawab akan meningkat manakala ada peningkatan pengetahuan dan kebebasan. Dalam hal ini adalah pengetahuan umum dan khusus tentang bencana banjir, tanah longsor, dan kekeringan serta kebebasan untuk mengatasi bencana itu dalam jangka pendek, sedang dan jangka panjang.

Tanggung Jawab Berarti Membatasi Diri karena Alam Terbatas

Manusia adalah makhluk yang tidak

pernah berhenti dalam keinginan. Dari hari ke hari keinginan itu terus bertambah. Senyatanya kemajuan masyarakat didorong oleh berbagai keinginan yang tidak pernah berhenti itu. Keinginan tidak menjadi masalah, sejauh keinginan itu terarah jelas demi kesejahteraan masyarakat dan mempertimbangkan keterbatasan alam. Pertanyaan yang kini harus diajukan adalah, menurut Jonas, bukan berapa banyak lagi yang bisa dilakukan manusia tetapi berapa banyak yang bisa ditanggung alam (Jonas, 1984:188). Bahwa ada batas toleransi daya dukung alam, itu sudah jelas. Seiring dengan gagasan Jonas, Barbour berpendapat bahwa, dalam kaitannya dengan problem ekologi, yang penting diperhatikan pertamanya bukan lah sikap protektif atau pun hormat pada setiap bentuk kehidupan melainkan sikap yang mau mempertimbangkan kemampuan alam dalam mendukung pertumbuhan. Jonas maupun Barbour bersesuaian paham bahwa dalam mengejar pertumbuhan ekonomi kita melihat bahwa daya dukung alam tidak diperhatikan. Jika negara-negara di dunia masih membangun perekonomian dengan pola seperti sekarang ini maka dalam waktu dekat ekosistem akan hancur. Di banyak negara pembangunan perekonomian dewasa ini lebih bersifat jangka pendek dan regional dari pada jangka panjang dan global. Substansi dari etika yang berwawasan masa depan merupakan jawaban atas problem-problem yang muncul akibat aktivitas masa kini.

Barbour menyatakan bahwa menaruh perhatian pada daya dukung alam tidak hanya

melibatkan pola produksi melainkan juga pola konsumsi. Terdapat dua pendekatan yang dikemukakan oleh Barbour (Barbour, 1992: 251) mengenai bagaimana menahan laju pertumbuhan ekonomi agar tetap berada pada tingkat yang rendah. Yang pertama, adalah kebijakan institusi dan sistem teknologis yang dirancang untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya alam. Yang kedua adalah memperkenalkan gaya hidup sederhana. Jika setiap individu menerapkan gaya hidup sederhana maka penggunaan sumber daya alam akan dapat dikurangi. Pola hidup sederhana tidak berarti gaya hidup yang lebih primitif melainkan lebih sehat. Kalau dilaksanakan secara bersama-sama dalam skala yang besar perubahan gaya hidup tersebut akan berpengaruh pada penurunan permintaan akan sumber daya. Perubahan tersebut akan menuntut pula dari masyarakat industri suatu pembalikan paradigma dari ekonomi kelimpahan menjadi ekonomi kecukupan. Kampanye mengenai gaya hidup sederhana akan lebih efektif jika didukung oleh kebijakan politis baik di tingkat lokal maupun nasional. Hanya melalui kebijakan politis sumber daya akan dapat diselamatkan. Melalui kata dan perbuatan setiap orang dapat mempengaruhi perilaku publik dan menciptakan tatanan politis baru (Barbour, 1992:257). Kita perlu mereorientasikan gaya hidup dan mengupayakan gaya hidup baru yang lebih bermutu baik secara individu maupun kolektif. Cara hidup yang baru bukan hanya muncul dari keprihatinan akan krisis akibat teknologi tetapi

sekaligus didorong oleh hasrat untuk memaknai hidup secara baru.

Bencana banjir bandang, tanah longsor dan kekeringan merupakan potret terang dari sikap ekspansif, eksploitatif, dominatif para pemegang kekuasaan dan masyarakat atas alam secara berlebihan, melampaui daya dukung alam. Akibatnya beberapa tempat dikategorikan sebagai daerah rawan bencana. Kepala Badan Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah Jawa-Madura, Is Mugiono mengatakan bahwa sekitar 2,011 juta hektar lahan di Jawa dan Madura masuk dalam kategori sangat rawan bencana. Selain berpotensi longsor, lahan itu juga bisa bergeser. Perhutani memetakan sedikitnya ada 23 titik rawan yang tersebar di Jawa-Madura (Kompas, 7/1/2006)

METODE PENYULUHAN

Materi etika lingkungan dengan tema tanggung jawab perlu disampaikan dengan metode yang baik dan benar. Metode penyuluhan yang cocok untuk menyampaikan materi itu adalah sebagai berikut:

Pertama adalah metode kebidanan: yaitu cara membantu orang lain mengatasi persoalan dengan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan terarah dan tepat kepada orang yang dibantu, sehingga ia sendiri yang menemukan jawaban atas persoalan yang sedang dihadapinya. Cara ini persis sama seperti seorang bidan yang menolong ibu dalam melahirkan putranya. Bidan itu hanya membantu. Begitu pula peran penyuluh pertanian. Penyuluh pertanian dalam

penyuluhan materi etika lingkungan hanya berperan sebagai pendamping dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang terarah sehingga masyarakat menemukan sendiri jawaban atas persoalan bencana alam. Jawaban-jawaban itu pada akhirnya akan mengantar mereka pada pemahaman yang lebih baik terhadap bencana alam dan bagaimana menanggulangi dan melestarikannya. Metode ini cocok untuk kelompok masyarakat yang cukup aktif mampu mengungkapkan permasalahan. Metode ini digunakan dalam suasana yang cukup hangat, dan gembira.

Kedua adalah metode fenomenologis: yaitu cara memberikan pemahaman kepada masyarakat dengan memperlihatkan fenomena-fenomena (gejala-gejala) dari bencana alam, akibat yang ditimbulkan, modal alam dan sosial yang dapat digunakan untuk menanggulangi bencana dan melestarikan alam. Yang penting dari metode ini adalah bahwa masyarakat diajak untuk melihat, mengalami sendiri gejala yang ada. Metode ini sangat cocok diberikan dalam penyuluhan di lapangan dengan melihat kejadian-kejadian, akibat-akibat yang ditimbulkan dan korban-korban yang berjatuh.

TIGAPILAR PENYULUHAN

Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam menyampaikan materi etika lingkungan dengan tema tanggung jawab disampaikan. Tiga hal penting itu adalah keteladanan, keterlibatan dalam pelatihan dan penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif.

Kekuatan penyuluhan dengan tema tanggung jawab terletak, pertama, dalam keteladanan. Artinya masyarakat akan menjadi lebih bertanggungjawab terhadap alam jika penyuluh sendiri memang bertanggungjawab dalam hal itu. Dalam hal ini yang dibutuhkan adalah ketrampilan penyuluh dalam memberikan contoh-contoh konkret. Penyuluh sendiri harus dapat melakukan materi yang diberikan dalam penyuluhan itu. Karenanya, materi penyuluhan sebaiknya sederhana, konkret dan bisa dilakukan oleh penyuluh sendiri.

Kekuatan kedua terletak dalam pelatihan, atau pelibatan para peserta penyuluhan. Penyuluhan dengan tema tanggungjawab hendaknya tidak hanya berisi teori yang diberikan di dalam ruangan, namun juga praktek di lapangan. Dalam praktek para peserta penyuluhan diajak secara persuasif untuk melakukan pelatihan dengan baik, sehingga mereka memahami bagaimana meningkatkan tanggungjawabnya dalam melestarikan alam.

Kekuatan ketiga terletak dalam penciptaan situasi dan kondisi yang kondusif bagi peserta untuk melaksanakan pelestarian alam dengan suka rela dan suka hati. Hal ini dilakukan dengan cara, misalnya, menghargai sekecil apa pun perbuatan baik yang bisa mereka lakukan untuk melestarikan alam. Ini penting, karena situasi dan kondisi dalam alam pikiran masyarakat telah teracuni oleh alam pikiran: “yang benar disalahkan, dan yang salah dibenarkan”. Menciptakan situasi dan kondisi

yang baik bagi pelestarian alam berarti menciptakan dan meneguhkan alam pikiran dan perilaku bahwa “perbuatan yang baik dan benar akan menghasilkan buah yang baik dan benar”. Para penyuluh sendiri harus yakin akan pola pikir dan perilaku yang baik dan benar itu.

PENUTUP

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan sering terjadinya bencana banjir bandang, tanah longsor, dan kekeringan, peran penyuluh pertanian dalam melestarikan alam semakin penting. Pelestarian alam harus dilihat sebagai bagian yang hakiki dari visi dan misi penyuluhan, karena tak mungkin ada penyuluhan tentang peningkatan hasil tanaman jika lahan pertanian rusak. Peran penyuluh pertanian adalah membaharui perilaku masyarakat, dengan meningkatkan tanggungjawab.

Tanggung jawab dalam menanggulangi bencana tidak pertama-tama dilihat sebagai sebuah kewajiban yang bersifat eksternal (dipaksakan dari pihak luar diri mereka), tetapi lebih sebagai kewajiban yang bersifat internal, artinya didesakkan oleh diri anggota masyarakat itu sendiri. Anggota masyarakat bertanggungjawab lantaran mereka mampu berbuat secara bertanggungjawab.

Kemampuan seperti itu dapat ditingkatkan, dengan cara meningkatkan pengetahuan terhadap alam, bencana serta meningkatkan kebebasan dalam mengambil keputusan yang tepat untuk mempertahankan daya dukung alam dan untuk mengatasi

bencana.

Cara atau metode yang digunakan untuk menyampaikan materi etika dengan tema tanggungjawab adalah metode kebidanan dan metode fenomenologis. Metode ini bertumpu pada kenyataan lapangan, pengalaman pribadi, dan refleksi, sehingga masyarakat sungguh-sungguh terlibat dan asyik dengan materi penyuluhan.

Penanggulangan bencana melalui pembaharuan perilaku masyarakat memang membutuhkan waktu yang panjang, keberanian untuk mulai, kesabaran dalam berproses, dan kerendahan hati dari para penyuluh pertanian untuk dianggap tidak populer.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Sodikin dan Nur Hidayati, “*Andaikan Kau Bisa Kusuap Diam*”, dalam Kompas 14/1/2006, hal. 50.
- Barbour, I., *Ethics in An Age of Technology*, SCM Press LTD, London, 1992
- Capra, Fritjof, *Titik Balik Peradaban* (terjemahan), Yayasan Bentara Budaya, Yogyakarta, 1987.
- Dedi Muhtadi, “*Setelah Bencana Itu Lewat*”, dalam Kompas 14/1/2006, hal. 49.
- Durb Paul, T. (ed.), *Technology and Responsibility*, Vol. 3, Reidel Publishing Company, Boston, 1987.
- Haryadi dan Untung Sudadi, “*Di Balik Masalah Penanggulangan Bencana*”, dalam Kompas 14/1/2006, hal. 54.
- Huber, Wolfgang, “*Toward an Ethics of Responsibility*”. *Journal of Religion*, No. 073, 1993.
- Jonas, H., *The Imperative of Responsibility in Search of an Ethics for the Technological Age*. Chicago: University of Chicago Press. 1984.
- Jonas, H., *The Phenomenon of Life*. Chicago: University of Chicago Press. 1982.
- Madina Nusrat, “*Wilayah yang Tidak Pernah Luput dari Bencana*”, dalam Kompas 14/1/2006, hal. 52.
- Melle, Ullrich, “*Responsibility and the Crisis of Technological Civilization: A Husserlian Meditation on Hans Jonas*”. *Human Studies*, Vol. 21, No. 4, October, 1998.
- Schumacher, E.F., *Kecil Itu Indah* (terjemahan), Blond & Briggs, England 1973, Yayasan Obor, Jakarta,
- Vogel, Lawrence, “*Hans Jonas's Diagnosis of Nihilism: The Case of Heidegger*”. *International Journal of Philosophical Studies*, Vol 3 (1), 1995.

BAHAN PENDUKUNG

- “Dua Juta Hektar Lahan di Jawa-Madura Rawan Bencana”, dalam Kompas, 7/1/2006, hal 1
- “Bencana Itu Terlalu Cepat Dilupakan”, dalam Kompas 14/1/2006, hal. 51.
- “Antara Kemapanan dan Keamanan”, dalam Kompas 14/1/2006, hal. 53.

**INDEKS PENGARANG
ILMU-ILMU PERTANIAN 2007**

<p>A Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi BIPP Kulon Progo Alia Bihrajihant Raya, Sri Peni Wastutiningsih, Sri Widodo</p>
<p>C Pemberdayaan Petani agar Mampu Mengembangkan Agribisnis Christine Sri Widiputranti</p>
<p>D Aplikasi Model Rekayasa Lahan Terpadu guna Meningkatkan Peningkatan Produksi Hortikultura secara Berkelanjutan di Lahan Pasir Pantai Dody Kastono Implementasi Prinsip-prinsip Pertanian Berkelanjutan oleh Petani di Kabupaten Kulon Progo Dyah Woro Untari, Sri Peni Wastutiningsih, Irham</p>
<p>G Evaluasi Program Pelatihan bagi Penyuluh Pertanian di BPP Kabupaten Gunungkidul Gunawan Yulianto</p>
<p>I Adopsi Petani Ternak terhadap Pelaksanaan Inseminasi Buatan pada Kambing Kacang di Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur Ita Kusmiati, Untung Subekti, Wahyu Windari</p>
<p>M Model Pengembangan Agrowisata dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Tani Tawangrejo Asri Miftakhul Arifin</p>
<p>P Pengembangan Sumberdaya Petugas Penyuluh Lapangan PPL Pertanian guna Menghadapi Persaingan dan Meraih Peluang Kerja P.C. Herbenu</p>

R

Sikap Petani terhadap Peran Penyuluh Pertanian dalam Pemberdayaan
Usahatani Pasca Gempa Bumi

**R. Hermawan, Sapto Husodo, FX Agus, Gunawan Yulianto, Amie Sulastiyah,
Hasan Azhari**

Penyebaran Teknologi Konservasi Lahan Kering melalui
Pemuka Pendapat di Kabupaten Bantul

R. Kunto Adi

S

Memahami dan Mengkritisi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Indonesia

Subejo

Pengaruh Jenis Pupuk Organik terhadap Produksi (Berat Umbi) Ubi Jalar
(*Ipomea batatas* L) Clon Madu

Suharno

Kajian Peran Kelembagaan Kelompok Tani dalam Mendapatkan
Modal Usaha Agribisnis Bawang Merah

Sukadi

Kelompok Tani sebagai Basis Ketahanan Pangan

Sunarru Samsi Hariadi

T

Peran Penyuluh Pertanian dalam Pelestarian Alam

Tri Nugroho

**INDEKS KOMULATIF
ILMU-ILMU PERTANIAN 2007**

Pengembangan Sumberdaya Petugas Penyuluh Lapangan PPL Pertanian guna Menghadapi Persaingan dan Meraih Peluang Kerja	1 – 11
P.C. Herbenu	
Memahami dan Mengkritisi Kebijakan Pembangunan Pertanian di Indonesia	12 – 25
Subejo	
Pemberdayaan Petani agar Mampu Mengembangkan Agribisnis	26 – 35
Christine Sri Widiputranti	
Adopsi Petani Ternak terhadap Pelaksanaan Inseminasi Buatan pada Kambing Kacang di Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun Propinsi Jawa Timur	36 – 47
Ita Kusmiati, Untung Subekti, Wahyu Windari	
Evaluasi Program Pelatihan bagi Penyuluh Pertanian di BPP Kabupaten Gunungkidul	48 – 60
Gunawan Yulianto	
Sikap Petani terhadap Peran Penyuluh Pertanian dalam Pemberdayaan Usahatani Pasca Gempa Bumi	61 – 71
R. Hermawan, Sapto Husodo, FX Agus, Gunawan Yulianto, Amie Sulastiyah, Hasan Azhari	
Pengaruh Jenis Pupuk Organik terhadap Produksi (Berat Umbi) Ubi Jalar (<i>Ipomea batatas</i> L) Clon Madu	72 – 78
Suharno	
Kelompok Tani sebagai Basis Ketahanan Pangan	79 – 86
Sunarru Samsi Hariadi	
Penyebaran Teknologi Konservasi Lahan Kering melalui Pemuka Pendapat di Kabupaten Bantul	87 – 99
R. Kunto Adi	
Peran Penyuluh Pertanian dalam Pelestarian Alam	100 – 111
Tri Nugroho	

Aplikasi Model Rekayasa Lahan Terpadu guna Meningkatkan Peningkatan Produksi Hortikultura secara Berkelanjutan di Lahan Pasir Pantai	112 – 123
Dody Kastono	
Model Pengembangan Agrowisata dalam Rangka Pemberdayaan Kelompok Tani Tawangrejo Asri	124 – 131
Miftakhul Arifin, Amie Sulastiyah, Ananti Yekti, Agus Wartapa	
Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi BIPP Kulon Progo	132 – 143
Alia Bihrajihant Raya, Sri Peni Wastutiningsih, Sri Widodo	
Implementasi Prinsip-prinsip Pertanian Berkelanjutan oleh Petani di Kabupaten Kulon Progo	144 – 155
Dyah Woro Untari, Sri Peni Wastutiningsih, Irham	
Kajian Peran Kelembagaan Kelompok Tani dalam Mendapatkan Modal Usaha Agribisnis Bawang Merah	156 – 164
Sukadi	

PEDOMAN PENULISAN NASKAH DALAM JURNAL ILMU-ILMU PERTANIAN

Naskah dalam Jurnal Ilmu-ilmu Pertanian ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, dengan gaya bahasa efektif dan akademis.

Naskah dapat berupa hasil penelitian atau studi pustaka yang diketik komputer (MS-Word atau yang kompatibel dengan MS-Word) menggunakan spasi ganda, tulisan disertai intisari (*abstract*). Panjang tulisan berkisar antara 16 sampai dengan 20 halaman kuarto (A4).

Naskah hasil penelitian mengikuti susunan sebagai berikut; halaman judul, nama penulis, alamat penulis, intisari, kata kunci, pendahuluan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka. Naskah konseptual tersusun atas halaman judul, pendahuluan, isi tulisan, penutup, daftar pustaka.

Grafik dan gambar garis dapat gambar dengan tinta cina atau menggunakan program grafik (komputer), grafik dan gambar diutamakan tidak berwarna (hitam putih). Judul gambar diletakkan di bawah gambar, diberi nomorurut sesuai dengan letaknya dan dicetak tebal. Masing-masing gambar diberi keterangan singkat dengan nomorurut yang diletakkan di luar bidang gambar. Gambar dan grafik diletakkan di dalam naskah.

Gambar fotografis diutamakan tidak berwarna (hitam putih) dan dicetak di atas kertas mengkilap, jelas dan tidak kabur. Nama lain (binomial), kata asing, latin dan bukan kata dalam Bahasa Indonesia dicetak miring.

Judul harus singkat dan jelas menunjukkan identitas subyek, indikasi tujuan studi dan memuat kata-kata kunci. Jumlah kata seyogyanya berkisar antara 6 - 12 buah, dituliskan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Nama atau nama-nama penulis ditulis tanpa gelar.

Abstarct (intisari), harus dapat memberi informasi mengenai seluruh isi karangan, ditulis dengan singkat, padat dan jelas dan tidak melebihi 250 kata, ditulis dalam Bahasa Inggris (untuk naskah dalam Bahasa Indonesia) dan Bahasa Indonesia (untuk naskah dalam Bahasa Inggris), intisari disertai *key words* (kata kunci).

Pendahuluan, berisi latar belakang, masalah dan tinjauan teori secara ringkas.

Metode penelitian, berisi penjelasan mengenai bahan dan alat yang digunakan dalam penelitian (kalau ada), waktu, tempat dan rancangan percobaan (teknik analisis).

Hasil dan pembahasan, disajikan secara ringkas (dapat dibantu dengan tabel, grafik atau foto-foto). Pembahasan merupakan tinjauan terhadap hasil penelitian secara singkat tetapi jelas dan merujuk pada literatur terkait.

Kesimpulan dan saran, berisi hasil nyata ataupun keputusan dari penelitian yang dilakukan dan saran tindakan lanjut untuk bahan pengembangan penelitian berikutnya.

Daftar pustaka, memuat semua pustaka yang digunakan dalam penulisan karangan. Daftar pustaka ditulis dalam urutan abjad secara kronologis (urut tahun).

Penulisan pustaka untuk buku dengan urutan; nama pokok (keluarga) dan inisial pengarang, tahun terbit, judul, jilid, edisi, nama penerbit dan tempat terbit. Setiap bagian diakhiri dengan tanda titik.

Penulisan pustaka untuk karangan dalam buku, majalah, surat kabar, proseding atau terbitan lain bukan buku, ditulis dengan urutan; nama pokok dan inisial pengarang, tahun terbit, judul karangan, inisial dan nama editor, judul buku, halaman pertama dan akhir karangan, nama penerbit dan tempat terbit.

Redaksi mempunyai hak untuk mengubah dan memperbaiki ejaan, tata tulis dan bahasa yang dimuat tanpa mengubah esensi.

Naskah yang telah ditulis dan sesuai dengan pedoman penulisan jurnal ilmu-ilmu pertanian diterima paling lambat satu bulan sebelum bulan penerbitan, dalam bentuk *hard printing* (cetak printer) dan *soft printing* (file).

Naskah dikirimkan kepada **M. Adlan Larisu**, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian (STPP) Jurusan Penyuluhan Pertanian Yogyakarta, Jalan Kusumanegara Nomor 2 Yogyakarta Kode Pos 55167 Telpn (0274) 373479 *Faximile* (0274) 375528. *E-Mail*: jurnal_stppyogya@yahoo.com